



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : RSUD DR. MUHAMAD SOEWANDHIE

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BILLY DANIEL MESSAKH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 877356

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.550.000.000**

1. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
4. Tanah Seluas 65 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/25 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **740.000.000**

1. MOBIL, ISUZU MUX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, HONDA WR-V Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.



25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.788.793.440

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 12.078.793.440

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.078.793.440

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.